

## DIPLOMASI INDONESIA PADA ISU POLITIK RUSIA-UKRAINA DENGAN PENDEKATAN *DISCOURSE NETWORK ANALYSIS*

Muhammad Bima Fahri<sup>1</sup>, Pipit Fitriyah<sup>2</sup>

AKMRTV Jakarta<sup>1</sup>, Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Gunadarma<sup>2</sup>  
[embimafahri22@gmail.com](mailto:embimafahri22@gmail.com)<sup>1</sup>, [fitriyah@staff.gunadarma.ac.id](mailto:fitriyah@staff.gunadarma.ac.id)<sup>2</sup>

### ABSTRAK

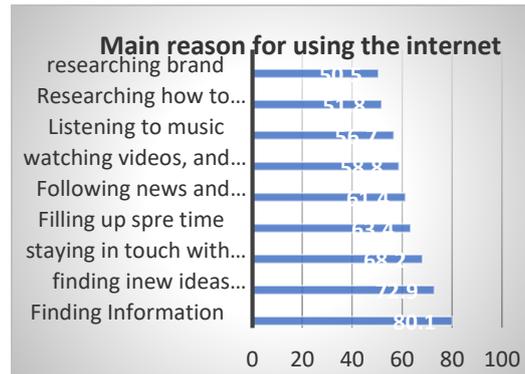
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sentimen pada pemberitaan posisi Indonesia pada isu politik Rusia-Ukraina di portal kompas.com periode 1 Maret – 31 Agustus. Negosiasi dilakukan untuk mengutamakan kepentingan negara. Tindakan diplomasi dilakukan untuk melindungi dan memajukan kepentingan nasional semaksimal mungkin dan dilakukan secara damai, menjaga perdamaian tanpa merugikan kepentingan nasional merupakan tujuan utama diplomasi. Analisis sentimen pro dan kontra pada pemberitaan isu politik Rusia-Ukraina analisis menggunakan Discourse Network Analisis (DNA) 1.31 dan divisualisasikan menggunakan perangkat lunak *visione 2.20*. Bagaimana perspektif aktor politik dan masyarakat yang terlibat dalam pembicaraan atau perdebatan tentang pemberitaan Diplomasi Indonesia pada isu politik Rusia-Ukraina mulai dari kunjungan Presiden Joko Widodo di tengah memanasnya situasi geopolitik dunia. Hasil penelitian berdasarkan data pemberitaan dari 1 Maret – 31 Agustus 2022, terdapat 10 berita dengan 42 pernyataan dari 11 aktor politik. Kategori yang ditemukan Diplomasi dan Mediasi dengan pernyataan positif sebesar 88% dan pernyataan negatif sebesar 12%. Seluruh argumen yang telah disampaikan membuat keputusan bahwa langkah pemerintah Indonesia dalam melakukan diplomasi ini sangatlah positif, Indonesia berhasil menjadi *betweenness* antar Rusia-Ukraina.

**Kata kunci:** Berita *Online*, *Discourse Network Analysis*, Negosiasi, Sentimen Positif Negatif.

### PENDAHULUAN

Beralihnya dunia dari era industrialisasi ke era informasi yang kemudian melahirkan masyarakat informasi (*information society*). Rogers (1991) menyatakan bahwa *information society* adalah sebuah masyarakat yang sebagian besar pekerjaannya adalah pekerja di bidang informasi, dan informasi telah menjadi elemen yang dianggap paling penting dalam kehidupan. Di era teknologi informasi, perkembangan pengguna internet semakin meningkat.

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, yang telah diprediksi oleh Alvin Toffler dalam bukunya yang berjudul “*The Third Wave*”, yaitu perkembangan teknologi komunikasi erat kaitannya dengan tiga faktor berikut, interaktivitas, non-massifikasi, dan asinkron (Meliana, Fatoni & Umam, 2023). Hal tersebut menunjukkan, bahwa demokrasi sebagai cara hidup kini menjadi arus utama yang diadopsi oleh banyak negara di dunia. Teknologi komunikasi dan informasi, menjadi proses demokrasi yang lebih jelas dan nilai-nilai demokrasi menyebar tanpa batas. Gambar 1. menunjukkan pengguna internet di Indonesia mempunyai beberapa alasan, sebagai berikut:



Gambar 1: *Main reason for using the Internet*

Sumber: Hootsuite we are social 2022

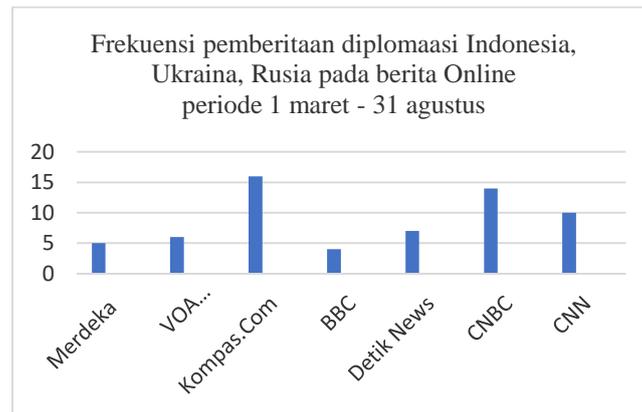
Data pada gambar 1. tertera bahwa 80,1% pengguna internet untuk mencari informasi dan 61,4% pengguna internet untuk mengikuti berita dan peristiwa terkini, termasuk situasi politik domestik dan internasional di Indonesia. Teknologi komunikasi menjadi dasar perkembangan komunikasi politik di era multimedia ini. Komunikasi politik selalu berkaitan erat dengan kebebasan berdemokrasi, khususnya kebebasan berekspresi. Komunikasi politik yang berlangsung di era globalisasi ini menunjukkan semakin menguatnya kebebasan demokrasi yang berujung pada kebebasan berekspresi di masyarakat dunia maya. Karena itu, kebiasaan komunikasi masyarakat mulai mengalami perubahan mendasar. Kebebasan berpendapat dalam skala yang lebih besar dilakukan melalui teknologi komunikasi.

Tahun 2022 Indonesia di guncang oleh beberapa isu politik domestik dan internasional yang menyita perhatian publik Indonesia, dengan terpilihnya menjadi tuan rumah KTT G20 yang akan dilaksanakan di Bali, dan krisis Ukraina telah menyita perhatian masyarakat Indonesia dan dunia terkait Perang Rusia-Ukraina. Indonesia selaku bagian dari komposisi internasional dengan melaksanakan tugas-tugas sistemik dan memahami tugas tersebut sesuai dengan kepentingan domestik dengan mempertimbangkan kemampuan yang dimiliki kemudian merumuskan dan menetapkan kebijakan luar negeri (Yeremia et al., 2021). Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri menjelaskan bahwa politik luar negeri bebas aktif bukanlah politik netral, tetapi politik luar negeri yang bebas menentukan sikap dan kebijaksanaan terhadap isu-isu internasional.

Prinsip politik ini tidak mengikatkan diri pada satu kekuatan dunia tertentu. Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi menegaskan bahwa prinsip bebas aktif masih relevan hingga saat ini karena prinsip ini dapat membawa Indonesia dapat mengatakan ‘ya’ atau ‘tidak’ ketika merespons suatu kejadian yang terjadi di dunia. Munculnya aliansi dan Politik Luar Negeri Bebas Aktif tidak bisa berjalan beriringan karena keduanya saling bertolak belakang. Namun dengan berbagai ancaman yang datang dan kemampuan pertahanan yang belum mencapai kekuatan esensial minimum, Indonesia menurut sejarahnya mampu mengambil langkah berbeda dengan politik luar negeri bebas aktifnya.

Dalam rangka kerja sama di bidang pertahanan dengan salah satu poros terkuat di dunia dengan melakukan seperti *Strategic Partnership*.

Krisis Ukraina merupakan perang politik yang menyita perhatian dunia internasional khususnya Indonesia sebagai negara yang menganut politik bebas aktif, dan peran Indonesia dalam diplomasi Ukraina-Rusia tidak lepas dari pemberitaan media. Fenomena ini didokumentasikan di Kompas.com. Perbandingan frekuensi pemberitaan antara portal berita online Kompas.com dengan portal berita lainnya dapat dilihat pada data berikut:



Gambar 2: Grafik pemberitaan portal media online  
Sumber: Arsip peneliti 2022

Data gambar 2, peneliti tertarik untuk meneliti fenomena diplomasi Indonesia pada isu politik Rusia- Ukraina untuk mengamati pola jaringan dan siapa saja aktor yang berpengaruh sebagai pihak pendukung dan pihak yang menolak adanya kebijakan diplomasi Indonesia dalam perang ukraina dan rusia dengan menganalisis berita - berita yang telah diterbitkan oleh Kompas.com. Keterkaitan data penelitian menggunakan metode analisis *Discourse Network Analysis* (DNA) yang dicetuskan oleh Philip Liefeld. *Discourse Network Analysis* (DNA) merupakan suatu teknik untuk memvisualisasikan wacana baik itu wacana politik maupun sosial budaya ke dalam sebuah jaringan. *Discourse Network Analysis is a combination of category based content analysis and social network analysis* (Buckton et al., 2019). Pendekatan ini memungkinkan untuk mengidentifikasi secara sistematis suatu struktur wacana dalam berbagai dokumen tekstual seperti artikel koran atau media cetak ataupun transkrip perdebatan parlemen, *Discourse Networking Analysis combines social network analysis with computer-assisted, qualitative content analysis to analyse the developement of actors and ideas in a relational and systematic way* (Breindl, 2013 dalam Pratama & Ulfa, 2017). Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah pembedaan sentimen Negosiasi Indonesia pada isu politik Rusia-Ukraina pada media Kompas.com menggunakan *Discourse Network Analysis*?

## TINJAUAN PUSTAKA

### Komunikasi Politik

Komunikasi politik (*political communication*) adalah metode analisa politik yang baru berkembang sejak dasawarsa 1990an dalam ilmu politik di Indonesia (Rauf & Nasrun, 1993), ketika perkembangan demokrasi dan teknologi informasi melanda secara global. Meskipun demikian, arus demokratisasi ini juga melahirkan terorisme di seluruh pelosok dunia. Kajian dalam ilmu komunikasi politik tidak hanya sebatas mengenai proses komunikasi yang didalamnya termuat pesan-pesan politik, tetapi juga pada bagaimana komunikasi dapat berlangsung dengan ideal dalam sistem politik pemerintahan. Proses komunikasi yang ideal adalah dimana dalam prosesnya senantiasa berlangsung timbal balik diantar para partisipan sehingga terdapat pergantian peran diantara partisipan.

Bahasan komunikasi politik tidak hanya sebatas dalam suatu sistem dalam negara, tetapi juga pada batas wilayah sistem luar negara, sehingga akan bertemu berbagai sistem dan akan saling mempegaruhi antara satu dengan lainnya. Hal ini sebagai akibat temuan teknologi canggih di bidang komunikasi. Kondisi ini yang kita kenal dengan sebutan era globalisasi. Komunikasi politik lebih lazim didefinisikan sebagai suatu proses linier atau suatu sistem. Pendekatan linier berorientasi pada efek atau pengaruh pesan politik, sedangkan pendekatan sistem berorientasi pada kestabilan atau kesinambungan suatu sistem politik. Kedua pendekatan ini memandang realitas komunikasi politik sebagai realitas yang teratur dan karenanya mudah diramalkan (Mulyana, 2001). Michael Schudon (1997) mengungkapkan definisinya tentang komunikasi politik, menurutnya komunikasi politik itu “*any transmission od messege that has, or is intended to have, an use of power on society or an attitude toward the use power*” (Kamaruddin, 2015).

Hal ini menunjukkan bahwa tempat penting komunikasi politik dalam proses politik adalah menjembatani pesan yang ingin disampaikan. Proses ini terjadi di semua lapisan masyarakat dan di mana pun informasi dapat dipertukarkan antara individu atau kelompok. Dalam kehidupan bernegara, setiap individu membutuhkan informasi, terutama mengenai kegiatan masing-masing pihak dan tugasnya. sebagai bagian dari fungsi tersebut. Rush & Althoff (1997) mendefinisikan komunikasi sebagai proses dimana informasi politik yang relevan diteruskan dari suatu bagian sistem politik menuju bagian lainnya, dan diantara sistem-sistem sosial dengan sistem-sistem politik.

### Komunikasi Politik dalam Media Online

Media online telah mengantarkan gelombang demokratisasi. Sejak tahun 1997, internet telah digunakan sebagai kampanye online sebagai saluran komunikasi politik, mengkristal dalam kampanye politik dan pembentukan opini publik, serta terus berkembang seiring dengan perkembangan dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Penggunaan media sosial dalam komunikasi politik merupakan salah satu strategi untuk melibatkan generasi muda (milenial) secara aktif dalam kegiatan politik. Menurut Silih Agung Wasesa Managing Director Asia PR dan Penulis Buku *Political Branding and Public Relation* “kehadiran media baru berbasis digital membuat

informasi politik tidak hanya semakin masif, tetapi juga terdistribusi dengan cepat dan bersifat interaktif'. Dengan karakteristik tersebut, beberapa aktor politik di beberapa negara menggunakan media sosial dalam kampanye politik, selain itu media baru dapat menarik pemilih muda dan biayanya rendah. Dosen ilmu komunikasi UGM, Wisnu Martha Adiputra, S.IP., M.Si mengatakan pemanfaatan media sosial dalam kampanye politik merupakan bentuk literasi media baru yang menunjukkan komunikasi politik berkualitas. Dalam hal ini warga tidak lagi diposisikan sebagai penonton, tetapi tetapi juga bisa mengungkapkan pendapatnya. Hanya saja yang terjadi saat ini literasi media di Indonesia kurang berjalan dengan baik.

### **Diplomasi Publik**

Diplomasi publik dimaknai sebagai proses komunikasi pemerintah terhadap publik mancanegara yang bertujuan untuk memberikan pemahaman atas negara, sikap, institusi, budaya, kepentingan nasional, dan kebijakan -kebijakan yang diambil oleh negaranya (Wang dalam Hennida, 2009). Wang dalam Hennida (2009) melihat diplomasi publik sebagai suatu usaha untuk mempertinggi mutu komunikasi antara negara dengan masyarakat. Dampak yang ditimbulkan meliputi bidang politik, ekonomi, sosial, dan dalam pelaksanaannya tidak lagi dimonopoli oleh pemerintah. Sementara itu, Jan Mellisen (2006; Jayanti et al., 2019)) mendefinisikan diplomasi publik sebagai usaha untuk mempengaruhi orang atau organisasi lain di luar negaranya dengan cara positif sehingga mengubah cara pandang orang tersebut terhadap suatu negara. Berdasarkan semua definisi itu, dapat dikatakan bahwa diplomasi publik berfungsi untuk mempromosikan kepentingan nasional melalui pemahaman, menginformasikan, dan mempengaruhi publik di luar negeri. Karenanya, diplomasi publik merupakan salah satu instrumen *soft power*.

Sebagai instrumen *soft power*, perkembangan diplomasi publik tergolong pesat. Pesatnya perkembangan ini dipicu oleh kenyataan bahwa upaya -upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam diplomasi jalur pertama dianggap telah gagal mengatasi konflik -konflik antarnegara. Kegagalan diplomasi jalur pertama telah mengembangkan pemikiran untuk meningkatkan diplomasi publik sebagai cara alternatif untuk menyelesaikan konflik -konflik antarnegara (McDonald, 1991). Hal ini terjadi karena diplomasi publik memiliki ciri sebagai kelompok bukan pemerintah, bentuk nya yang informal efektif dalam menurunkan tensi ketegangan, menghilangkan

Penerapan diplomasi publik tidak terlepas dari pengkomunikasian kebijakan luar negeri terhadap publik manca. Ciri utama dalam diplomasi publik adalah melibatkan semua stakeholder dalam prosesnya. Stakeholder di sini tidak hanya Departemen Luar Negeri, tetapi juga lintas departemen dalam pemerintah, swasta, NGO, media, dan individu. Dengan porsi keterlibatan yang beragam dan besar tersebut, maka rancangan strategi komunikasi harus dikedepankan.

### Strategi Komunikasi dalam Diplomasi Publik

Wang dalam Hennida (2009) melihat diplomasi publik sebagai konsep yang sifatnya multi dimensi dan mencakup tiga tujuan utama, yaitu: (1) mempromosikan tujuan dan kebijakan negara, (2) bentuk komunikasi nilai dan sikap, serta (3) sebagai sarana untuk meningkatkan pemahaman bersama dan mutual trust antara negara dan masyarakat. Mengacu pada tujuan tersebut, diplomasi publik menekankan pada pesan yang dapat dilakukan oleh siapa saja. Sebagai bentuk partisi pasi, perlu dibangun strategi komunikasi dalam diplomasi publik, yaitu strategi komunikasi pemerintah untuk mengatur kekuatan-kekuatan di dalam seperti misalnya menggunakan kelompok -kelompok non-negara (MNC, NGO) dan strategi komunikasi di luar dengan kelo mpok sasaran publik manca. Christopher Ross (2003), Koordinator Bidang Diplomasi Publik Departemen Luar Negeri AS, mengatakan bahwa ada tujuh pilar yang harus dipahami agar diplomasi publik yang dilakukan bisa berhasil, dalam artian dapat meme nuhi tujuannya dalam menginformasikan, melibatkan, dan mempengaruhi publik

Christopher Ross (2003; Fadlillah, 2017)), Koordinator Bidang Diplomasi Publik Departemen Luar Negeri AS, mengatakan bahwa ada tujuh pilar yang harus dipahami agar diplomasi publik yang dilakukan bisa berhasil, dalam artian dapat meme nuhi tujuannya dalam menginformasikan, melibatkan, dan mempengaruhi publik manca (*to inform, engage, and influence*).

Pertama, ada koordinasi kebijakan pada tataran nasional. Kegiatan diplomasi publik bentuknya beragam, dan semuanya ditujukan untuk mendukung kepentingan nasional dan memenuhi kewajiban-kewajiban internasional suatu negara. Untuk itu, harus dipastikan terlebih dulu bahwa publik manca memahami betul kebijakan yang diambil. Harus dipastikan pula bahwa sumbernya berasal dari pemerintah, bukan ya ng lain. Diplomasi publik pada tataran nasional perlu dikoordinasikan pada tataran pemerintah mengingat beragamnya jenis pesan, bahasa, kelompok sasaran, format, dan media. Koordinasi penting dilakukan agar prioritas atas informasi dan pemahaman tema menjadi jelas; pesan yang akan disampaikan adalah konsisten; dan sumber - sumber yang digunakan adalah efektif. Kedua, mesti ada cukup alasan dan rasionalitas yang mendukung suatu kebijakan. Ketiga, pesan yang akan disampaikan ke publik mancanegara harus konsist en, kredibel, dapat dipercaya, dan benar. Perlu dipahami bahwa publik yang menjadi sasaran diplomasi publik adalah beragam. Maka, hal yang dapat diandalkan adalah kredibilitas - *what we mean and mean what we say*. Keempat, menghindari munculnya kontradiksi antara konsistensi dan pembuatan pesannya. Konsistensi dipahami sebagai kemampuan untuk mendesain suatu pesan untuk suatu publik tertentu. Mengingat perkembangan ICT (*Information Communication Technology*), maka pesan itu juga harus didesain secara cepat. Kevakuman informasi akan memunculkan pesan yang datang dari sumber di luar pemerintah. Kelima, karena kelompok sasaran diplomasi publik adalah luas dan beragam, maka perlu memanfaatkan semua saluran komunikasi yang ada seperti internet, broadcasting, publikasi cetak, press placements, travelling speaker, atau pertukaran pendidikan dan budaya. Keenam, memperluas aliansi dan kerjasama dengan sektor -sektor swasta dan aktor nonnegara

lainnya. Ketujuh, perlunya dibangun fondasi kepercayaan dan pemahaman melalui komitmen dan dialog. Selain ketujuh pilar tersebut, diplomasi publik juga memiliki tiga tingkatan komunikasi (Anholt, 2006) yaitu: (1) perangkat diplomasi publik `menjual` apapun bentuk kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, (2) `menjual` kebijakan pemerintah, namun dengan kewenangan untuk mengondisikan model dan isi kebijakan luar negerinya, (3) menempatkan sebagai instrumen kebijakan, bukan pada metode komunikasi kebijakan. Dalam tahapan ini banyak digunakan pendekatan-pendekatan yang sifatnya soft power dibanding hard power dalam mengubah pemahaman dan perilaku kelompok sasaran.

### **METODELOGI PENELITIAN**

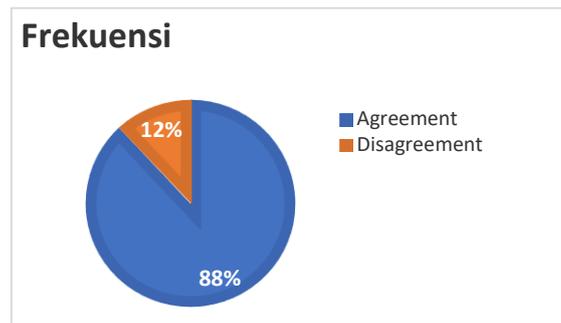
Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan *Discourse Network Analysis* (DNA). Menurut Leifeld (2013) DNA adalah pendekatan metodologi yang mengombinasikan analisis wacana dan analisis jaringan sosial untuk mengidentifikasi sebuah wacana dalam berbagai dokumen sehingga membentuk sebuah jaringan. Pendekatan ini memungkinkan untuk mengidentifikasi secara sistematis suatu struktur wacana dalam berbagai dokumen tekstual seperti artikel koran atau media cetak ataupun transkrip perdebatan parlemen (Leifeld & Haunss, 2012). Dalam menunjang penelitian ini, studi ini menggunakan perangkat lunak *Discourse Network Analyzer* (DNA) versi 1.31, sebuah perangkat lunak berbasis JAVA yang dikembangkan oleh Philip Liefeld. Proses pengolahan data menggunakan software DNA adalah dengan menseleksi berita online di situs berita Kompas.com berita yang diambil dalam jangka waktu 1 maret – 30 Agustus yang diseleksi berdasarkan topik Diplomasi Indonesia Ukraina dan Rusia. Untuk membuat visualisasi jaringan stakeholder x stakeholder, menggunakan network visualisation software Visone versi 2.18.

### **HASIL DAN DISKUSI**

Indonesia sebagai negara dengan prinsip politik luar negerinya yang bebas aktif menghasilkan pada pembukaan undang-undang dasar (1945) menyatakan bahwa salah satu alasan pembentukan pemerintah Indonesia harus ikut serta dalam penyelenggaraan ketertiban dunia. Partisipasi Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia terus berlanjut hingga saat ini. Jadi kunjungan ini sebagai respon atas krisis global yang melanda dunia sejak merebaknya COVID-19 dan diperparah dengan perang di Ukraina, kata Menlu Retno Marsudi. Artinya, Indonesia sangat tanggap terhadap kondisi dan situasi dunia, yang membuka peluang bagi Indonesia untuk kembali ke orientasi tradisionalnya mencoba membangun jembatan perdamaian dan menjadi bagian dari solusi. Diplomasi Indonesia terhadap negara yang sedang berperang pun bukan hanya kali ini, Indonesia merupakan negara yang aktif yang selalu berkontribusi dalam menciptakan kedamaian.

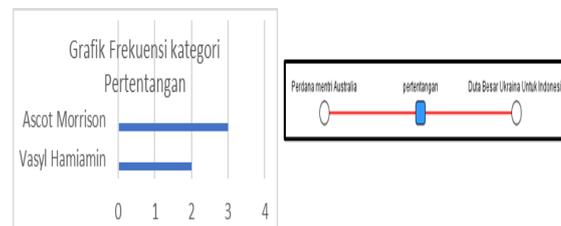
Analisis fenomena diplomasi Indonesia terhadap Ukraina Rusia di Kompas.com, bisa disimpulkan bahwa diplomasi Indonesia juga telah memenuhi kriteria komunikasi





Gambar 5: Frekuensi Kategori Mediasi  
Sumber: Olahan data peneliti 2022

*Discourse Network Analysis* yang telah dilakukan pada kategori Pertentangan mengenai kebijakan presiden Indonesia dalam melakukan diplomasi dengan hasil sebanyak 5 pernyataan. Pada kategori ini lima pernyataan seluruhnya mewakili sisi kontra dalam kebijakan pemerintah Indonesia dalam melakukan diplomasi, karna seluruh pernyataan dalam kategori ini negative terdapat dua aktor yang memberikan pernyataan yaitu, Ascott Morrison selaku perdana menteri Australia dan juga Vasyl Hamiamim selaku Duta Besar Ukraina untuk Indonesia.



Gambar 6: Frekuensi Kategori Pertentangan  
Sumber: Olahan data peneliti 2022

Dari keseluruhan visualiasi pola jaringan antar aktor dapat ditarik kesimpulan bahwa jumlah pro kontra Diplomasi Indonesia Ukraina Rusia berjumlah 11 aktor dan aktor kontra terdapat dua aktor. Dengan pernyataan dari aktor politik paling banyak diberikan oleh Joko Widodo yang memberikan 14 pernyataan pro . yang mendapatkan hasil 88% dengan jumlah 37 pernyataan, dan lima pernyataan kontra yang mendapatkan hasil 12%. Dapat dilihat dari jumlah nodes aktor dan nodes organisasi yang jumlahnya selalu sama berarti setiap aktor yang memberikan pernyataan semua berasal dari organisasi yang berbeda, hali ini berarti isu politik banyak organisasi untuk menanggapi dan berpendapat soal Diplomasi Indonesia Ukraina Rusia.

Discourse network analysis merupakan suatu teknik untuk memvisualisasikan wacana baik itu wacana politik ataupun sosial budaya ke dalam sebuah jaringan. Melihat hasil yang diperoleh penelitian terdahulu dengan judul —*Policy congruence and*

*advocacy strategies in the discourse networks of minimum unit pricing for alcohol and the soft drinks industry levy—*, yaitu setelah membandingkan posisi stakeholder dalam jaringan wacana, menunjukkan kolaborasi lintas sektor yang lebih besar diantara penentang kebijakan daripada pendukung. Dalam hal ini menunjukkan bahwa sesuai dengan konsep yang diusung Liefeld & Haunss (2012), yang memungkinkan untuk mengidentifikasi secara sistematis suatu relasi wacana dalam berbagai dokumen tekstual seperti artikel koran atau media cetak ataupun transkrip perdebatan di parlemen. Sehingga pada penelitian ini menunjukkan bahwa perbandingan sentimen yang ditemukan dengan pernyataan positif (*Agreement*) lebih besar dibandingkan pernyataan negatif (*Disagreement*).

### KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dari pengumpulan berita terkait diplomasi Indonesia Ukraina Rusia sejak 1 Maret 2022 hingga 31 Agustus 2022 terdapat 10 berita dengan 42 pernyataan dari 13 Aktor, dengan menggunakan Discourse Network Analysis yang dapat menjadi salah satu metode untuk memperoleh hasil berupa jaringan dengan sekaligus memuat analisis teks, sebagai berikut:

1. *Discourse Network Analysis* (DNA) mengkategorikan pernyataan pada pemberitaan “Diplomasi Indonesia Ukraina Rusia di Media Online Periode 1 maret hingga 31 agustus dengan menemukan konsep kategori Diplomasi dan Mediasi.
2. Sentimen pemberitaan antar aktor politik ditemukan dengan pernyataan positif (*Agreement*) lebih besar yaitu 88%, jumlah sebanyak 37 pernyataan dan dibandingkan pernyataan negatif (*Disagreement*) yaitu sebesar 12% dengan jumlah sebanyak lima pernyataan.
3. Visualisasi jaringan Visone menemukan aktor yang paling banyak memberi pernyataan yaitu Joko Widodo (14 pernyataan). Pengamat Hubungan Internasional (enam pernyataan), Menteri luar negeri (lima pernyataan) Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (tiga pernyataan).

Berdasarkan kesimpulan dari peneliti apa yang diperoleh, maka saran yang diberikan adalah:

1. Saran bagi pengguna media sosial / masyarakat. Pengguna media sosial/masyarakat harus lebih bijaksana dalam memahami pemberitaan media dan juga dalam beropini, dan harus pandai dalam memilih berita yang disampaikan.
2. Saran bagi Pemerintah. Pemenrintah boleh saja melakukan kebijakan seperti diplomasi, tetapi harus tau batasan jangan sampai terlalu ikut campur urusan negara lain. Sehingga benar-benar terwujud secara maksimal tujuan bersama.
3. Saran bagi peneliti selanjutnya. Penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan cara mengembangkan penelitian sejenis tetapi dengan pokok bahasan yang berbeda dan mengembangkan teori lainnya, Sehingga dapat dilakukan pengembangan konseptualisasi menggunakan metode kritis dan melakukan wawancara dengan editor berita untuk mengkaji berbagai fenomena lainnya

## REFERENSI

- Anholt, S. (2006). Public Diplomacy and Place Branding: Where`s the Link. *Journal of Communication Management* 2, 271–276.
- Buckton, C. H., Fergie, G., Leifeld, P., & Hilton, S. (2019). A discourse network analysis of UK newspaper coverage of the “sugar tax” debate before and after the announcement of the Soft Drinks Industry Levy. *BMC Public Health*, 19(1), 490. <https://doi.org/10.1186/s12889-019-6799-9>
- Fadlillah, S. (2017). Diplomasi Publik Haji Umrah untuk ekonomi, politik dan budaya Indonesia. In <https://eprints.uai.ac.id>. Universitas Al-azhar Indonesia. <https://eprints.uai.ac.id/1482/1/ILS0093-20.pdf>
- Hennida, C. (2009). Diplomasi Publik dalam Politik Luar Negeri. *Jurnal Unair*, 22(1), 17–23.
- Jayanti, A. D., Suwartiningsih, S., & Ismoyo, P. J. (2019). DIPLOMASI PUBLIK KOREA SELATAN DI INDONESIA MELALUI SEKTOR PENDIDIKAN KOREA INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY (KOICA). *Jurnal Studi Pembangunan Interdisiplin*, XXVIII(1), 11–28.
- Kamaruddin, H. (2015). *MODUL KOMUNIKASI POLITIK*. Universitas Malikussaleh. <https://repository.unimal.ac.id/1648/1/MODUL%20KOMUNIKASI%20POLITIK%20%28LENGKAP%202015%29%20ILMU%20KOMUNIKASI.pdf>
- Leifeld, P. (2013). Reconceptualizing Major Policy Change in the Advocacy Coalition Framework: A Discourse Network Analysis of German Pension Politics. *The Policy Studies Journal*, 41(1), 169–198.
- Leifeld, P., & Haunss, S. (2012). Political discourse networks and the conflict over software patents in Europe. *European Journal of Political Research*, 51(3), 382–409.
- Meliana, A., Fatoni, A., & Umam, C. (2023). Digital Opinion Tautan “FIFA” Di Media Sosial Twitter Dengan Social Network Analysis. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 13(2), 57-73.
- McDonald, J. (1991). Further Exploration of Track Two Diplomacy. In *Timing the De-escalation of International Conflict*. University Press.
- Mulyana, D. (2001). *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*. Remaja Rosdakarya.
- Pratama, I. B., & Ulfa, A. A. I. (2017). Discourse Networking Analysis Sebagai Metode Penelitian Alternatif dalam Kajian Ilmu Komunikasi . *Jurnal Penelitian Komunikasi Dan Opini Publik*, 21(2), 126–136. <https://jurnal.kominfo.go.id/index.php/jpkop/article/view/1129/718>
- Rauf, M., & Nasrun, M. (1993). *Indonesia dan Komunikasi Politik*. Gramedia Pustaka Utama.
- Rogers, E. M. (1991). *Teknologi Komunikasi: Media baru Dalam Masyarakat* (Z. Mohd. Mess, Ed.). Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Rush, M., & Althoff, P. (1997). *Pengantar Sosiologi Politik*. Raja Grafindo Persada.

Yeremia, A. E., Mutti Anggitta, Darang Sahdana Candra, Aisha Rasyidilla Kusumasomantri, & Dizar Sabana. (2021). *Skenario Politik Luar Negeri Indonesia 2045*. <https://img.lab45.id/images/article/2021/12/05/157/2420skenario-politik-luar-negeri-indonesia-2045.pdf>